

ABSTRAK

Salah satu bentuk aktivitas yang dapat dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* adalah membuat keputusan terkait dengan penghentian sementara aktivitas perdagangan saham atau dapat disebut dengan suspensi. Suspensi merupakan salah satu bentuk sanksi dari BEI terhadap emiten yang telah melakukan pelanggaran tertentu. Permasalahan dari penetapan sanksi suspensi ini adalah pada suspensi atas sanksi yang dikenakan oleh Bursa tentang hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa dapat dikenakan sanksi Suspensi seperti adanya perdagangan saham yang dianggap tidak wajar atau harga saham perusahaan meningkat di atas volume transaksi normalnya tersebut belum mengatur batas waktu suspensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum suspensi atas saham perusahaan tercatat dan kepastian hukum bagi investor ritel dan perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder.

Akibat hukum suspensi atas saham perusahaan tercatat adalah perusahaan tercatat tidak diijinkan untuk membuka kembali perdagangan saham perusahaannya sebelum memenuhi ketentuan pembukaan sanksi suspensi seperti penyediaan laporan keuangan audited perusahaan tercatat, melakukan public expose terhadap aktivitas perusahaan, ataupun hingga perusahaan tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang termasuk menerbitkan ketentuan berupa peraturan bursa maupun surat edaran yang isinya memberikan pengaturan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh semua pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka sanksi suspensi perusahaan tercatat berdasarkan ketentuan yang ada pada surat edaran tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas memberikan petunjuk sebagai dasar jangka waktu pemenuhan perikatan bagi perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat juga tidak diberikan kejelasan atas berapa lama jangka waktu pemberian sanksi suspensi di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Bursa Efek Indonesia memiliki pertimbangannya sendiri untuk melakukan investigasi terhadap adanya pola transaksi yang tidak wajar seperti harga saham yang meningkat terus menerus selama satu periode waktu perdagangan saham.

Kata Kunci: **suspensi, perusahaan tercatat, pasar modal**

ABSTRACT

One form of activity that can be carried out by the Indonesia Stock Exchange as a Self Regulatory Organization (SRO) is to make decisions related to the temporary suspension of stock trading activities or can be called suspension. Suspension is a form of sanction from the IDX against issuers who have committed certain violations. The problem with the suspension of sanctions is the suspension of sanctions imposed by the Exchange on other matters which, according to the Exchange's consideration, may be subject to suspension sanctions, such as trading in shares that are deemed unreasonable or the company's share price increasing above its normal transaction volume. suspension time. This study aims to determine the legal consequences of suspension of listed company shares and legal certainty for retail investors and listed companies for the absence of a time limit for suspension actions by the Indonesia Stock Exchange.

This study uses a normative juridical approach, namely the approach to analyzing the law as a normative set of laws and regulations. The specification of this research is analytical descriptive, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and legal implementation practices concerning these problems. The data used is secondary data.

The legal consequence of the suspension of the shares of a listed company is that the listed company is not allowed to re-open the trading of its company's shares before fulfilling the provisions for opening the suspension of sanctions such as providing audited financial statements of the listed company, conducting public exposes to the company's activities, or until the listed company is filed for bankruptcy by its creditors or voluntarily. willing to apply for Suspension of Debt Payment Obligations. The Indonesia Stock Exchange (IDX) has the authority to issue regulations in the form of stock exchange regulations and circulars which provide regulations for the implementation of activities on the Indonesia Stock Exchange (IDX). These provisions have binding force that must be obeyed by all parties on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Thus, the Indonesia Stock Exchange (IDX) can impose sanctions on the suspension of listed companies based on the provisions contained in the circular letter. Based on the above provisions, it can be concluded that there are no provisions that clearly provide instructions as the basis for the fulfillment period of engagement for listed companies. Listed companies are also not given clarity on how long the suspension sanction will be on the Indonesia Stock Exchange (IDX) because the Indonesia Stock Exchange has its own discretion to investigate any unusual transaction patterns, such as stock prices increasing continuously during a trading period.

Keywords: suspension, listed company, capital market